



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor);
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa/kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMDesa/Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngoro-oro dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngoro-oro.
5. Lurah adalah Lurah Ngoro-oro Kapanewon Patuk.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMDesa/Kalurahan Tahun 2018 -2024.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2023 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2023
 - Bab V Penutup
- (2) RPKKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 5 Oktober 2022

LURAH,
ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 5 Oktober 2022

CARIK,
ttd

DALYUNI

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa/Kalurahan mengenai potensi Kalurahan

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan kalurahan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJMDesa/Kalurahan) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDesa/Kalurahan) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. Potensi Sumberdaya kalurahan

Potensi Kalurahan Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Susunan Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Kesadaran Masyarakat untuk membangun yang cukup tinggi.
- e. Jiwa kegotongroyongan yang masih ada.
- f. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- h. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- i. Banyaknya masyarakat usia produktif.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Belum 100 % masyarakat dapat menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
- d. Banyak akses jalan yang belum memadai.

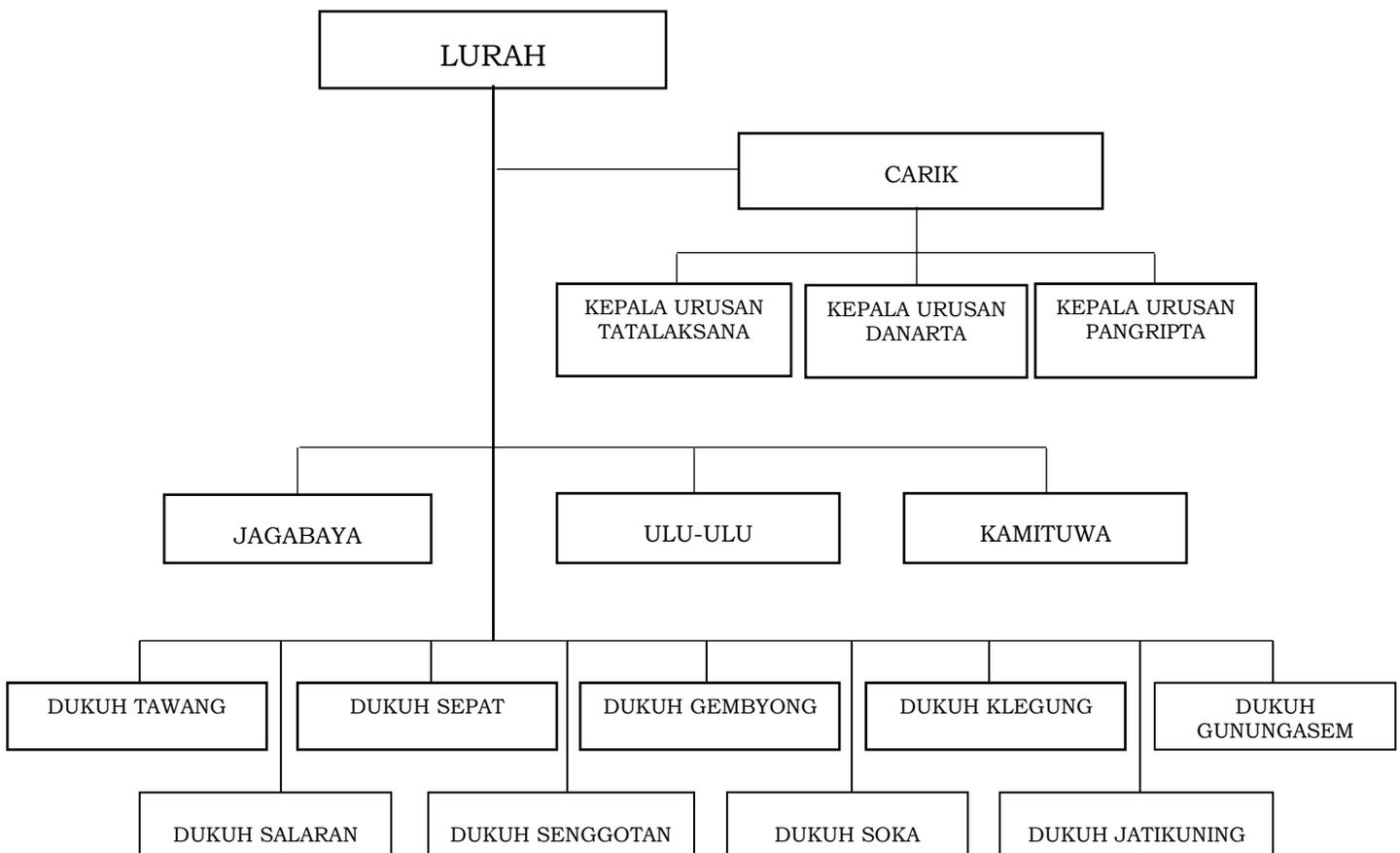
- e. Pungutan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
- f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
- g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
- h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
- i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
- j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional.
- k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah.
- l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 9 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



4. Pengertian RKPKalurahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa/Kalurahan.

5. Fungsi RKPKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan

Tersedianya dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APBDesa/Kalurahan) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

6. Proses penyusunan RKPKalurahan

Penyusunan Perencanaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat kalurahan yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun kalurahan. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

7. Keterkaitan RKPKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. RKPKalurahan dengan RPJMKalurahan

RKPKalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa/Kalurahan.

b. RKPKalurahan dengan RAPBKalurahan

RKPKalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan

c. RKPKalurahan dengan DURKPKalurahan

RKPKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DURKPKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon (musrenbang) kapanewon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

C. Tujuan

1. Tujuan

RKPKalurahan disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pemerintah kalurahan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Kalurahan Tahun 2023 sumber pendanaannya dari APBKalurahan.
- b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2024 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui panewu sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2025 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKP Kalurahan meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

D. Visi dan Misi Kalurahan.

1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa/kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pamong kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksploitasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Ngoro-oro sebagai berikut:

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja pamong sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat

6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel2. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Ngoro-oro berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo
Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Ketinggian tanah di Kalurahan Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24^oC sampai dengan 34^oC.

Dengan demikian Kalurahan Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Memuat arah kebijakan kalurahan Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN NGORO-ORO
TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	51,600,000	6,600,000	
4 1 1	Hasil Usaha	4,500,000	4,500,000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	4,500,000	4,500,000	
4 1 2	Hasil Aset	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa			
4 1 2 3	Pasar Desa			
4 1 2 7	Kios Milik Desa			
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa			
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;			
4 1 2 91	Balai desa	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 92	Kantor desa;			
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	

4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	45,750,000	750,000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;			
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa	45,000,000		
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa			
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa			
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	750,000	750,000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa			
4 2	Transfer	1,686,689,600	1,768,959,300	
4 2 1	Dana Desa	820,862,000	820,862,000	
4 2 1 1	Dana Desa	830,145,000	830,145,000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	54,418,800	49,688,500	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	49,688,500	49,688,500	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4,730,300		
4 2 3	Alokasi Dana Desa	708,408,800	708,408,800	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	708,408,800	708,408,800	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	63,000,000		
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	63,000,000		
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa			
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa			
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya			
4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	40,000,000	190,000,000	
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	40,000,000	190,000,000	
4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades			
4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa			

4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 3	Pendapatan Lain	39,000,000	36,800,000	
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	34,800,000	32,800,000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	34,800,000	32,800,000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-		
4 3 6	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 6 1	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	-	-	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB			
4 3 9 91	Hadiah perlombaan			
	JUMLAH PENDAPATAN	1,777,089,600	1,812,359,300	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan prioritas belanja kalurahan tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.

BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2023				
Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
5	BELANJA			

5 1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	939,198,937.00	834,680,800.00	
5 1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	778,151,217.00	746,675,900.00	
5 1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	40,800,000.00	ADD, DLL
5 1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	557,252,800.00	545,755,700.00	ADD, DLL
5 1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,281,032.00	38,281,032.00	ADD
5 1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62,207,385.00	50,139,168.00	ADD
5 1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	53,500,000.00	50,000,000.00	ADD
5 1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,450,000.00	6,000,000.00	ADD
5 1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18,510,000.00	15,700,000.00	PBH
5 1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	82,661,000.00	10,861,000.00	
5 1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,100,000.00	1,000,000.00	ADD
5 1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,261,000.00	2,261,000.00	DLL, ADD
5 1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63,000,000.00		PBP
5 1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	3,000,000.00		PBH
5 1.2.91	Pengadaan mebeleur	4,800,000.00	1,600,000.00	DLL, PAD
5 1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2,500,000.00	2,500,000.00	DLL, ADD
5 1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4,000,000.00	3,500,000.00	PAD, ADD
5 1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12,703,197.00	9,900,000.00	
5 1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4,322,000.00	4,300,000.00	PBH

5 1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.931.197.00	2,400,000.00	PBH, PAD
5 1.3.90	Penyusunan monografi desa	1,000,000.00	1,000,000.00	DLL, ADD
5 1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,450,000.00	2,200,000.00	PAD
5 1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58,561,025.00	61,743,900.00	
5 1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7,994,200.00	7,994,500.00	PBH
5 1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5,950,000.00	5,533,000.00	PBH
5 1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,350,000.00	3,350,000.00	ADD
5 1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7,400,000.00	5,400,000.00	DLL, PBH
5 1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3,600,000.00	3,600,000.00	PBH
5 1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,400,000.00	2,400,000.00	PAD
5 1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,747,400.00	1,747,400.00	DLL, ADD
5 1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	23,965,000.00	23,965,000.00	DDS
5 1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2,654,000.00	1,654,000.00	DLL, ADD
5 1.4.95	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam		4,200,000.00	ADD
5 1.4.96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2,154,425.00	1,900,000.00	DLL, PBH
5 1.5.	Sub Bidang Pertanahan	4,468,498.00	5,500,000.00	
5 1.5.90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	4,468,498.00	5,500,000.00	DLL
5 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	312,477,500.00	748,903,500.00	
5 2.1.	Sub Bidang Pendidikan	30,090,000.00	31,990,000.00	

5 2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24,300,000.00	24,300,000.00	DDS
5 2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2,100,000.00	4,000,000.00	DDS
5 2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3,690,000.00	3,690,000.00	DDS
5 2.2.	Sub Bidang Kesehatan	162,075,000.00	169,260,000.00	
5 2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82,170,000.00	82,170,000.00	DDS
5 2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,875,000.00	3,875,000.00	DDS
5 2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,130,000.00	9,130,000.00	DDS
5 2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9,600,000.00	9,800,000.00	DDS
5 2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28,990,000.00	28,990,000.00	DDS
5 2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7,175,000.00	10,775,000.00	DDS
5 2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3,385,000.00	6,770,000.00	DDS
5 2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	17,750,000.00	17,750,000.00	DDS
5 2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48,450,000.00	423,467,000.00	
5 2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		3,000,000.00	DDS
5 2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa		95,000,000.00	DDS
5 2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		150,000,000.00	PBK
5 2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		110,000,000.00	DDS
5 2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40,000,000.00	40,467,000.00	PBK

5 2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	3,950,000.00		DDS
5 2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		25,000,000.00	DDS
5 2.3.92	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	4,500,000.00		DDS
5 2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56,176,000.00	93,000,000.00	
5 2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		18,000,000.00	DDS
5 2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		27,000,000.00	DDS
5 2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	46,134,000.00	48,000,000.00	DDS
5 2.4.92	Pengelolaan sampah desa/permukiman	10,042,000.00		DDS
5 2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9,686,500.00	9,686,500.00	
5 2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2,331,500.00	2,331,500.00	PBH, DDS
5 2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7,355,000.00	7,355,000.00	DDS
5 2.8.	Sub Bidang Pariwisata	6,000,000.00	21,500,000.00	
5 2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		12,000,000.00	DDS
5 2.8.90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6,000,000.00	9,500,000.00	DDS
5 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57,276,703.00	52,581,500.00	
5 3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19,506,803.00	10,750,000.00	
5 3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	6,450,000.00	4,000,000.00	DLL, PBH
5 3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,200,000.00		PBH
5 3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid.	2,775,000.00		DLL

	Hukum & Pelindungan Masy.			
5 3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7,081,803.00	3,000,000.00	PBH
5 3.1.92	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung kesiapsiagaan bencana		3,750,000.00	PBH, DLL
5 3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14,230,000.00	11,181,500.00	
5 3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		1,000,000.00	PAD
5 3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		3,000,000.00	PBH
5 3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6,380,000.00	7,181,500.00	DLL
5 3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7,850,000.00		PBH
5 3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,619,900.00	16,000,000.00	
5 3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		4,000,000.00	PBH
5 3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		4,000,000.00	DLL
5 3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1,625,000.00	6,000,000.00	DLL
5 3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,990,000.00		PBH
5 3.3.93	Operasional Karang Taruna	2,004,900.00	2,000,000.00	PBH, ADD
5 3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16,920,000.00	14,650,000.00	
5 3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3,800,000.00	3,800,000.00	DDS
5 3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6,150,000.00	5,150,000.00	ADD
5 3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2,820,000.00	2,550,000.00	ADD

5 3.4.96	Operasional PKK	4,150,000.00	3,150,000.00	ADD
5 4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	307,202,050.00	151,060,500.00	
5 4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	27,384,000.00	13,500,000.00	
5 4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	27,384,000.00	10,000,000.00	DDS
5 4.1.91	Pembinaan kelompok perikanan darat		3,500,000.00	DDS
5 4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137,048,400.00	85,375,000.00	
5 4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	123,928,400.00	75,000,000.00	DDS
5 4.2.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	9,745,000.00	7,000,000.00	DDS
5 4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3,375,000.00	3,375,000.00	DDS
5 4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7,200,000.00		
5 4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	7,200,000.00		DDS
5 4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		7,125,000.00	
5 4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional		7,125,000.00	DDS
5 4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,000,000.00	6,625,000.00	
5 4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4,000,000.00	6,625,000.00	DDS
5 4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	138,769,650.00	38,435,500.00	
5 4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	131,889,650.00	34,435,500.00	PAD, DDS
5 4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4,880,000.00		DDS
5 4.7.92	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2,000,000.00	4,000,000.00	DDS
5 5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	396,900,996.00	113,600,000.00	

5 5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65,700,996.00	20,000,000.00	
5 5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	65,700,996.00	20,000,000.00	DDS
5 5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	331,200,000.00	93,600,000.00	
5 5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	331,200,000.00	93,600,000.00	DDS
	JUMLAH BELANJA	2,020,256,186.00	1,900,826,300.00	

3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	243,166,586	142,467,000	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	243,166,586	142,467,000	
6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	243,166,586	142,467,000	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	50,000,000	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	-	50,000,000	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	-	50,000,000	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RPKPKALURAHAN TAHUN 2022

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih banyak program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh kalurahan;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMKalurahan yang lebih mendesak yaitu untuk kegiatan PPKM pada penanggulangan bencana non alam (pandemi COVID-19), ketahanan pangan hewani-nabati dan kegiatan penanganan stunting.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKalurahan

1. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas kalurahan belum semuanya bisa terdani karena perubahan kebijakan pemerintah untuk kegiatan penanggulangan bencana non alam (COVID-19), ketahanan pangan hewani-nabati dan kegiatan pencegahan stunting.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023

Prioritas program kegiatan skala kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan melalui dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Prioritas program kegiatan skala Kalurahan Tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2024, dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2.

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam peyusunan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKPKalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Kalurahan diantaranya : Pemerintah Kalurahan, BPK, LKD, KPMK, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUMKal, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah kalurahan dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKPKalurahan.

Dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 5 Oktober 2022
Lurah,

ttd

SUKASTO

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

No	Uraian	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2022	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket.	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			100%	13.1%	73%	0	8,850,000	23,965,000	760,078,217	63,000,000	0	40,385,397	7,900,000	76,350,923	
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			100%	50.71%	99%	0	0	0	755,628,217	0	0	18,510,000	0	46,015,600	
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	100%	53.38%	100%	0	0	0	37,800,000	0	0	0	0	3,150,000	
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	100%	53.52%	100%	0	0	0	557,252,800	0	0	0	0	42,865,600	
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	100%	48.81%	99%	0	0	0	38,281,032	0	0	0	0	0	
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya beban Oprasional Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	100%	28.19%	98%	0	0	0	61,344,385	0	0	0	0	0	
	5 Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	100%	53.48%	100%	0	0	0	53,500,000	0	0	0	0	0	
	6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Lancarnya beban Oprasional Bamuskal	Kalurahan	100%	36.08%	98%	0	0	0	7,450,000	0	0	0	0	0	
	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terbayarnya insentif RT/RW	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	18,510,000	0	0	
2.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			100%	25.25%	94%	0	4,000,000	0	1,100,000	63,000,000	0	3,000,000	0	11,561,000	
	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Arsip kalurahan tertata dengan baik	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	
	2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Gedung/ kantor yang lebih nyaman	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,000	

	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Kantor pelayanan umum yang lebih nyaman	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	63,000,000	0	0	0	0		
	4	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya alat kerja (laptop, printer, proyektor)	Kalurahan	100%	23.33%	90%	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0		
	5	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000		
	6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang siap pakai	Kalurahan	100%	21.40%	80%	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		
	7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Peralatan kerja yang siap pakai	Kalurahan	100%	32.00%	85%	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0		
3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			100%	0%	81%	0	2,450,000	0	0	0	0	0	4,931,197	4,300,000	1,000,000
	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Dokumen kependudukan dan potensi kalurahan	Kalurahan	100%	0%	50%	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0		
	2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertatanya dokumen/arsip yang baik	Kalurahan	100%	0%	75%	0	0	0	0	0	0	4,931,197	0	0	
	3	Penyusunan monografi desa	Dokumen monografi kalurahan yang informatik	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
	4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Basis data terpadu RTM	Kalurahan	100%	0%	100%	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0		
4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			100%	23.82%	92%	0	2,400,000	23,965,000	3,350,000	0	0	13,944,200	3,600,000	13,305,825	
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen perencanaan kalurahan yang partisipatif	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	7,994,200	0	0	
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Data RTM yang akurat dan pengelolaan BUMDes yang akuntabel	Kalurahan	100%	79.83%	100%	0	0	0	0	0	0	5,950,000	0	0	
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen RKP Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	3,350,000	0	0	0	0	0	
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dokumen keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	31.76%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terbayarnya honor petugas aset	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Dokumen Perkal Aset Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	50%	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0		

	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	LPPK, LKPK dan IPPK	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,400
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Akses informasi desa lebih baik	Kalurahan	100%	2.11%	80%	0	0	23,965,000	0	0	0	0	0	0
	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Dokumen laporan keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	24.49%	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,000
	10	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan	Terlaksanakannya pembangunan sesuai perencanaan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,425
5.		Sub Bidang Pertanahan			100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,468,498
	1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Tersedianya pengganti tanah desa	Kalurahan	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,468,498
II		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			100%	13.50%	75%	0	0	270,146,000	0	0	40,000,000	2,331,500	0	0
1.		Sub Bidang Pendidikan			100%	29.69%	83%	0	0	30,090,000	0	0	0	0	0	0
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor Guru PAUD dan TK	Kalurahan	100%	49.59%	100%	0	0	24,300,000	0	0	0	0	0	0
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Pelatihan Guru TK/PAUD	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terbayarnya honor pengelola perpustakaan	Kalurahan	100%	0%	50%	0	0	3,690,000	0	0	0	0	0	0
2.		Sub Bidang Kesehatan			100%	30.58%	98.75%	0	0	162,075,000	0	0	0	0	0	0
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Honor kader dan PMT	Kalurahan	100%	42.94%	100%	0	0	82,170,000	0	0	0	0	0	0
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dll)	Kader Kesehatan yang terlatih	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	3,875,000	0	0	0	0	0	0
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pencegahan stunting	Kalurahan	100%	54.06%	90%	0	0	9,130,000	0	0	0	0	0	0
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Tersedianya prasarana posyandu	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0
	5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terselenggaranya kegiatan Posbindu	Kalurahan	100%	49.41%	100%	0	0	28,990,000	0	0	0	0	0	0
	6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Masyarakat hidup lebih sehat	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	7,175,000	0	0	0	0	0	0
	7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Makanan bergizi untuk siswa PAUD	Kalurahan	100%	49.19%	100%	0	0	3,385,000	0	0	0	0	0	0
	8	Insentif kader kesehatan/KB	Terbayarnya insentif Kader	Kalurahan	100%	49.01%	100%	0	0	17,750,000	0	0	0	0	0	0
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100%	30%	97%	0	0	8,450,000	0	0	40,000,000	0	0	0
	1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasya	Balai Padukuhan yang lebih baik	Saluran dan Soka	100%	89.88%	90%	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0

	2	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Peta Desa yang teraupdate	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	3,950,000	0	0	0	0	0	0	
	3	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Sarana alat pemandian jenazah	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				100%	23%	100%	0	0	56,176,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pemberian stimulan jamban sehat	Jamban sehat bagi RTM	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	46,134,000	0	0	0	0	0	0	
	2	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Lomba bank sampah dan pelatihan ecoenzim	Kalurahan	100%	45.73%	100%	0	0	10,042,000	0	0	0	0	0	0	
5.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				100%	21.30%	74%	0	0	7,355,000	0	0	0	2,331,500	0	0	
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Baliho/ poster informasi kalurahan	Kalurahan	100%	42.60%	98%	0	0	0	0	0	0	2,331,500	0	0	
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Tersedianya jaringan internet dengan baik	Kalurahan	100%	0%	50%	0	0	7,355,000	0	0	0	0	0	0	
6	Sub Bidang Pariwisata				100%	29.17%	0%	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Terselenggaranya kegiatan desa wisata	Kalurahan	100%	29.17%	0%	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				100%	10.46%	95%	0	0	3,800,000	12,720,000	0	0	13,271,803	9,854,900	17,230,000	
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100%	25.00%	88%	0	0	0	0	0	0	10,281,803	0	9,225,000	
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Satuan Linmas yang lebih baik	Kalurahan	100%	0%	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,000	
	2	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Lembaga Kebencanaan Kalurahan yang siaga	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	
	3	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Masyarakat yang taat dan sadar hukum	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000	
	4	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kaltana yang lebih baik	Kalurahan	100%	0%	60%	0	0	0	0	0	0	7,081,803	0	0	
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				100%	50.00%	100%	0	0	0	0	0	0	0	7,850,000	6,380,000	
	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)	Terlaksnannya HUT RI dan Hari Jadi kab. Gunungkidul	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000	
	4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	7,850,000	0	
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				100%	18%	97%	0	0	0	0	0	0	2,990,000	2,004,900	1,625,000	

	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Lapangan olahraga yang siap digunakan	Kalurahan	100%	53.23%	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,000	
	2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Terbinanya Karang Taruna	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0	
	3	Operasional Karang Taruna	Lancarnya beban oprasional Karang Taruna	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	2,004,900	0	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			100%	12%	96%	0	0	3,800,000	12,720,000	0	0	0	0	0	
	1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Terbayarnya honor KPM	Kalurahan	100%	47.37%	100%	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	
	2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kemiskinan di Kalurahan terdata/terpetakan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	5,750,000	0	0	0	0	0	
	3	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Lancarnya beban operasional LPMK	Kalurahan	100%	0%	90%	0	0	0	2,820,000	0	0	0	0	0	
	4	Operasional PKK	Lancarnya beban operasional PKK	Kalurahan	100%	0%	95%	0	0	0	4,150,000	0	0	0	0	0	
IV		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100%	6%	99%	0	131,889,650	143,928,400	0	0	0	0	0	0	
1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			100%	0%	100%	0	0	27,384,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Pembuatan kolam perikanan darat	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	27,384,000	0	0	0	0	0	0	
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			100%	28%	95%	0	0	137,048,400	0	0	0	0	0	0	
	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Bantuan bibit/benih padi kepada masyarakat	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	123,928,400	0	0	0	0	0	0	
	2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Makanan ringan dari pelepah pisang	Kalurahan	100%	84.81%	84.81%	0	0	9,745,000	0	0	0	0	0	0	
	3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kelompok tani/gapoktan yang baik	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	3,375,000	0	0	0	0	0	0	
3.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			100%	0%	100%	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Penyandang difabel yang terlatih	SLB SP	100%	0%	100%	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	
4.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			100%	0%	100%	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Pengelolaan BUMDes yang terlatih	BUMDes Margo Mulyo	100%	0%	100%	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	
5.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			100%	0%	100%	0	131,889,650	6,880,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Los Pasar Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	131,889,650	0	0	0	0	0	0	0	

	2	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Klompok ekonomi produktif yang bersaing	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	4,880,000	0	0	0	0	0	0
	3	Pembinaan/ pelatihan pengelola pasar desa	Pengelola pasar yang terlatih	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				100%	31%	100%	0	0	396,900,996	0	0	0	0	0	0
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				100%	11.01%	100%	0	0	65,700,996	0	0	0	0	0	0
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bencana yang tertangani	Kalurahan	100%	11.01%	100%	0	0	65,700,996	0	0	0	0	0	0
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				100%	00.50	100%	0	0	331,200,000	0	0	0	0	0	0
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Pemberian BLT-DD	Kalurahan	100%	50%	100%	0	0	331,200,000	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI

: NGORO-ORO
: PATUK
: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan	13 OB	Lurah	12 bulan	40,800,000	ADD,DLL	√			Januari - Desember
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan	260 OB	Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	545,755,700	ADD,DLL	√			Januari - Desember

3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan	300 OP	Lurah, Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	38,281,032	ADD	√			Januari - Desember
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	50,139,168	ADD	√			Januari - Desember
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan	117 OB	Anggota BPK	12 bulan	50,000,000	ADD	√			Januari - Desember
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan	1 Ls	Anggota BPK	12 bulan	6,000,000	ADD	√			Januari - Desember
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	612 OB	Ketua RT/RW	12 bulan	15,700,000	PBH	√			Januari - Desember
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa						10,861,000					
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,000,000	ADD	√			Juni
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,261,000	PBH	√			Juli
3	Pengadaan mebeleur	Kalurahan	3 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,600,000	PAD	√			Juli
4	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,500,000	ADD	√			Januari - Desember
5	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	3,500,000	ADD	√			Januari - Desember
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						9,900,000					
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	4,300,000	PBH	√			Juli, Desember
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,400,000	PAD	√			Pebruari
3	Penyusunan monografi desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,000,000	ADD	√			Juli, Desember
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,200,000	PAD	√			Januari/Pebruari
4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						61,743,900					
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	3 bulan	7,994,500	PBH	√			Juli, September, Desember
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	2 bulan	5,533,000	PBH	√			Pebruari, November
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	2 bulan	3,350,000	ADD	√			Oktober, November
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	5,400,000	PBH	√			Januari, Agustus, Desember
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan	36 OB	Petugas Aset	4 bulan	3,600,000	PBH	√			Januari - Desember

6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	2,400,000	PAD	√			Juni, Agustus, Oktober
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	3 bulan	1,747,400	ADD	√			Januari - Maret
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Pengelola SID	12 bulan	23,965,000	DDS	√			Januari - Desember
9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	1,654,000	ADD	√			Januari - Desember
10	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	Kalurahan	21 Potong	Pamong Kalurahan	1 bulan	4,200,000	ADD	√			April
11	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan	2 kali	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,900,000	PBH	√			Juli, November
5. Sub Bidang Pertanian						5,500,000					
1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Kalurahan	1 paket	Pamong Kalurahan	12 bulan	5,500,000	DLL		√		Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 1						834,680,800					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1. Sub Bidang Pendidikan						31,990,000					
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	96 OB	Guru PAUD/TK	12 bulan	24,300,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kalurahan	1 Ls	Guru PAUD/TK	1 bulan	4,000,000	DDS	√			Mei
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	24 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	3,690,000	DDS	√			Januari - Desember
2. Sub Bidang Kesehatan						169,260,000					
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	1104 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	82,170,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dll)	Kalurahan	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	3,875,000	DDS	√			Januari - Desember
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	9,130,000	DDS	√			Januari - Desember
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	9,800,000	DDS	√			Maret, Mei, September
5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan	562 OB	Kader Posbindu	12 bulan	28,990,000	DDS	√			Januari - Desember
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	10,775,000	DDS	√			Januari - Desember
7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan	175 Anak	Anak Balita/PAUD	3 bulan	6,770,000	DDS	√			April, Agustus, Desember
8	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	17,750,000	DDS	√			Januari - Desember
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						423,467,000					

1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Jatikuning	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	DDS	√			Juli - Agustus
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Soka	p 245 m / 78.90 m3	Masyarakat	3 bulan	95,000,000	DDS	√			Juni - Juli
3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	5 Padukuhan	p 400 m / 133 m3	Masyarakat	3 bulan	150,000,000	PBK	√			Juli - September
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Tawang	p 39.0 m / 128.19 m3	Masyarakat	2 bulan	110,000,000	DDS	√			Agustus - September
5	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Sepat	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	40,467,000	PBK	√			Juli - Agustus
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	6 bulan	25,000,000	DDS	√			Mei - Juli
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman						93,000,000					
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Kalurahan	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	18,000,000	DDS	√			Juni - Juli
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kalurahan	18 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	27,000,000	DDS	√			Agustus - Oktober
3	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan	11 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	48,000,000	DDS	√			Juli - September
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						9,686,500					
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	2,331,500	DDS	√			Januari - Desember
2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	7,355,000	DDS	√			Januari - Desember
6. Sub Bidang Pariwisata						21,500,000					
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	12,000,000	DDS	√			Mei -Juli
2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	9,500,000	DDS	√			September - November
Jumlah Per Bidang 2						748,903,500					
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						10,750,000					
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan	1 Ls	Linmas kalurahan	4 bulan	4,000,000	PBH	√			Maret, Juni, September, Desember
2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan	1 Ls	KSB, Sibat dan Monjj	1 bulan		PBH	√			Maret
3	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	1 Ls	FPRB, KSB dan Sibat	2 bulan	3,000,000	PBH	√			Juli - Agustus

4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kesiapsiagaan Bencana	Kalurahan	1 Ls	FPRB, KSB	1 bulan	3,750,000	DLL	√			Juli
5	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan	1 Ls	Pengurus Jaga Warga	2 bulan	-	PBH	√			Pebruari, Juli
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Kalurahan				11,181,500					
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan	24 OR	Pelatih kesenian	1 bulan	1,000,000	PAD	√			Juli
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan	1 kali	Grup kesenian	1 bulan	3,000,000	PBH	√			Agustus
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	7,181,500	DLL	√			Juni - Agustus
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga						16,000,000					
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan	3 Kali	Kontingen atlit kalurahan	1 bulan	4,000,000	PBH	√			Agustus
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemuda/ Karang taruna	1 bulan	4,000,000	DLL	√			Agustus
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	6,000,000	DLL	√			Januari - Desember
4	Operasional Karang Taruna	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	2,000,000	ADD	√			12 bulan
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						14,650,000					
1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan	24 OB	KPM	12 bulan	3,800,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan	1 Ls	Tim KPKKal	12 bulan	5,150,000	ADD	√			Januari - Desember
3	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan	1 Ls	LPMP dan LPMK	12 bulan	2,550,000	ADD	√			Januari - Desember
4	Operasional PKK	Kalurahan	1 Ls	PKK	12 bulan	3,150,000	ADD	√			Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 3						52,581,500					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						13,500,000					
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	DDS	√			Maret - April
2	Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	3,500,000	DDS	√			Mei
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						85,375,000					
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	75,000,000	DDS	√			Maret - April
2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	7,000,000	DDS	√			Juni
3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan	1 Ls	Anggota Kelompok Tani / Gapoktan	1 bulan	3,375,000	DDS	√			September
3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						7,125,000					
1	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan	1 Ls	Kelompok UKM	2 bulan	7,125,000	DDS	√			Agustus, Oktober

4.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					6,625,000					
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan	2 kali	Pengurus BUMKal	2 bulan	6,625,000	DDS	√			Mei, September
5.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					38,435,500					
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemkal dan Masyarakat	3 bulan	34,435,500	DDS	√			September - November
2	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Kalurahan	1 Ls	Pengelola BUMDes, Pengelola Pasar	1 bulan	4,000,000	DDS	√			November
Jumlah Per Bidang 4						151,060,500					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA										
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					20,000,000					
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	20,000,000	DDS	√			Januari - Desember
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa					93,600,000					
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	61,200,000	DDS	√			Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 5						113,600,000					
JUMLAH TOTAL						1,900,826,300					
6	PEMBIAYAAN										
2.	Pengeluaran Pembiayaan					50,000,000	DDS	√			
1	Penyertaan Modal BUMDes Bersama					50,000,000					

Tabel 4.2
 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN) TAHUN 2024
 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2025

KALURAHAN : NGORO-ORO
 KAPANEWON : PATUK
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

NO	BIDANG	URUSAN	OPD	NAMA KAMUS/ USULAN PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	HARGA PER SATUAN	DEVINISI OPERASIONAL/ SYARAT & KETENTUAN	KET.
1	Bidang Ekonomi	Kelautan dan Perikanan	DKP	(PIWK) - Kampanye gemar makan ikan di posyandu	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye gemar makan ikan di posyandu	Angkatan	3,100,000	1. Ada pengajuan permohonan 2. Jumlah peserta (bumil, busu, ibu yang memiliki balita, kader PKK, remaja) = 25 orang 3. Lokasi Posyandu belum mendapat kegiatan sejenis setahun sebelumnya	PIWK
2	Bidang Ekonomi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPKUKMTK	(PIWK) - Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	kelompok	14,500,000	penyelenggaraan kegiatan bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dibidang digital marketing 1. mengajukan proposal. 2. jumlah peserta 30 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 3. peserta dalam usia produktif dan mempunyai usaha/produk. 4. kegiatan dilaksanakan selama 3 hari. 5. Diutamakan untuk lokasi yang jaringan internetnya lancar.	PIWK

3	Bidang Ekonomi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPKUKMTK	(PIWK) - Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM.	kelompok	13,870,000	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan jiwa kewirausahaan dan pemahaman tentang manajemen usaha bagi UMKM di semua sektor sehingga menjadi UMKM yang mandiri, mampu bersaing dan mengembangkan usahanya. 1. mengajukan proposal. 2. jumlah peserta 20 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 3. peserta dalam usia produktif. 4. pelatihan dilaksanakan selama 3 hari.	PIWK
4	Bidang Ekonomi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPKUKMTK	(PIWK) - Pelatihan Teknik Ecoprint	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint.	kelompok	16,000,000	Penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan keterampilan pembuatan ecoprint. Produk yang dihasilkan adalah kain motif ecoprint. Peserta punya basic tentang teknik ecoprint. 1. mengajukan proposal. 2. jumlah peserta 20 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 3. peserta dalam usia produktif. 4. pelatihan dilaksanakan selama 3 hari.	PIWK
5	Bidang Fisik dan Prasarana	Pekerjaan Umum	DPUPRKP	(PIWK) - Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	m panjang	869,197.64	SYARAT & KETENTUAN PENGUSULAN - Pengusulan pada 1 ruas jalan kabupaten dengan panjang minimal 50 meter - Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018 - Upload foto kondisi - Upload titik koordinat (titik awal-titik akhir) DEFINISI OPERASIONAL Pembangunan Drainase Jalan Type B (sedang) Ukuran 0,8 x 0,6 m tebal 0,3 m satuan per m' berupa: - Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 1.26 m3 - Pasangan Batu dengan Mortar 0.77 m3	PIWK
6	Bidang Fisik dan Prasarana	Pekerjaan Umum	DPUPRKP	(PIWK) - Pembangunan Talud Tinggi 3 meter	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Volume Talud Jalan Kabupaten Dibangun	m3	6,390,871.06	SYARAT & KETENTUAN PENGUSULAN - Pengusulan pada 1 ruas jalan kabupaten yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018 - Pengusulan mencantumkan panjang talud (meter) minimal 10 meter - Upload foto kondisi - Upload titik koordinat	PIWK

7	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIWK) - Bantuan sosial alat bantu dengar	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberian alat bantu dengar	Unit	600,000	1. Penyandang disabilitas sensorik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami kerusakan pendengaran ringan atau karena faktor usia rusak/berkurang fungsi indera pendengaran 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIWK
8	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIWK) - Bantuan sosial alat bantu Kruk	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberian alat bantu kruk	Unit	400,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIWK
9	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIWK) - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Kursi Roda	Unit	1,800,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, cerebal palsy atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIWK
10	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIWK) - Bantuan Sosial Alat Bantu Walker/ Tongkat kaki tiga	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberiannbantuan alat walker/ tongkat kaki tiga	Unit	350,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh , kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIWK
11	Bidang Ekonomi	Perdagangan	DISDAG	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bazar Produk IKM Lokal, yang menampilkan 20 IKM Lokal	kali	15,000,000	a. Jumlah IKM yang ditampilkan sebanyak 20 IKM b. Produk berkualitas dan diproduksi kontinyu c. Pelaksanaan bisa bersamaan dengan even-even tertentu misalkan rasulan/bersih desa, atau even tertentu lainnya,Peringatan Tujuh belas agustusan	PIS
12	Bidang Ekonomi	Pertanian	DPP	(PIS) - Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	unit	162,785,000	1. Melampirkan proposal usulan 2. Kelompok tani teregister 3. Ketersediaan lahan sumur dan melampirkan surat kerelaan penggunaan lahan untuk sumur 4. Berada di Zona Tengah dan Utara Kab. Gunungkidul /Kecamatan prioritas	PIS

13	Bidang Ekonomi	Kelautan dan Perikanan	DKP	(PIS) - Kampanye gemar makan ikan lansia	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye gemar makan ikan lansia	Angkatan	3,250,000	1. Ada pengajuan permohonan 2. Jumlah peserta lansia 25 orang, minimal 20 % peserta KK miskin 3. Peserta belum mendapat kegiatan sejenis setahun sebelumnya	PIS
14	Bidang Ekonomi	Pertanian	DPKH	(PIS) - Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif yang terlaksana	angkatan	2,225,000	1) Merupakan kelompok tani aktif yang teregister; 2) Belum pernah mendapatkan fasilitas serupa; 3) Menyiapkan bahan baku dan lokasi tempat untuk praktek; 4) Jumlah peserta 25 orang	PIS
15	Bidang Ekonomi	Pariwisata	DISPAR	(PIS) - Pembuatan Toilet Umum / MCK	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	Paket	61,000,000	1. Mengajukan usulan/proposal 2. Melampirkan Surat Keterangan Kepastian lahan berupa foto copy Sertifikat kepemilikan/Surat Ijin/Surat Sewa tanah/Surat Hibah/Surat Kekancangan/Surat perjanjian pemanfaatan lahan 3. Melampirkan SK Penetapan Pokdarwis oleh Lurah atau SK Pengukuhan Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata 4. Berlokasi di Kawasan Daya Tarik Wisata 5. Melampirkan data ketersediaan aksesibilitas (Jalan, air, dll) 6. Melampirkan data kunjungan wisata 2 Tahun terakhir	PIS
16	Bidang Fisik dan Prasarana	Perhubungan	DISHUB	(PIS) - Pemasangan RPPJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pemasangan RPPJ	Unit	13,000,000	- Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten (sesuai SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018) - Mencantumkan koordinat titik pemasangan - Spesifikasi pemasangan berupa tiang penyangga dari pipa galvanis, panel daun rambu dari alumunium, tulisan dapat memantulkan cahaya	PIS

17	Bidang Fisik dan Prasarana	Perhubungan	DISHUB	(PIS) - Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Meter	1,500,000	- Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten (sesuai SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018) - Sudah ada talud/sudah ada pengerasan bahu jalan minimal satu meter - Pengusulan untuk pemasangan guadrail minimal 20 meter dengan kelipatan 4 meter - Mencantumkan koordinat titik pemasangan (titik awal dan titik akhir) - Spesifikasi pemasangan berupa tiang penyangga dari pipa galvanis, reflektor dapat memantulkan cahaya	PIS
18	Bidang Fisik dan Prasarana	Perumahan Rakyat & Pemukiman	DPUPRKP	(PIS) - Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kumuh)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Stimulan Perbaikan/Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Unit	20,000,000	1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga 2. Memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni (aspek tidak layak huni: atap, lantai, dinding, ketahanan konstruksi) sehingga perlu upload foto kondisi 3. Memiliki atau menguasai tanah secara sah di tapak bangunan rumah yang akan mendapat bantuan; 4. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Gunungkidul (Rp1.900.000) 6. Masuk dalam database kabupaten (DTKS-Sikab Gumregah); 7. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB); 8. Bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan; 9. Besaran bantuan Rp. 20.000.000,-/unit (material 17,5 juta & upah tenaga 2,5 juta) 10. Lokasi selain Kalurahan Wonosari, Kepek, Selang, Baleharjo, dan Kalurahan Logandeng	PIS
19	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan Sosial Alat Bantu Walker/ Tongkat kaki tiga	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberiannbantuan alat walker/ tongkat kaki tiga	Unit	350,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh , kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS

20	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan sosial alat bantu Kruk	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberian alat bantu kruk	Unit	400,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS
21	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Kursi Roda	Unit	1,800,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, cerebal palsy atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS
22	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan sosial alat bantu dengar	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberian alat bantu dengar	Unit	600,000	1. Penyandang disabilitas sensorik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami kerusakan pendengaran ringan atau karena faktor usia rusak/berkurang fungsi indera pendengaran 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS
23	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jaga Warga	Jumlah 9 kelompok jaga warga di 9 (sembilan) padukuhan	Kelompok	15,000,000		Dana Keistimewaan
24	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah 1 bangunan sarana latihan pelestari tradisi seni	Unit	200,000,000		Dana Keistimewaan
25	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelompok Seni Budaya	Jumlah 9 kelompok kesenian di 6 padukuhan	Kelompok	25,000,000		Dana Keistimewaan
26	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan Pemangku Keistimewaan	1 Angkatan	Angkatan	10,000,000		Dana Keistimewaan